

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat tetap eksis di pasar global. Tuntutan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangan dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas teori agensi.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini berdasarkan IAI melalui PSAK No. 1 dalam bukunya SAK (2002:7) menyebutkan: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ukuran kinerja perusahaan pada periode tertentu. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah informasi mengenai laba. Informasi laba merupakan unsur penting yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan baik pihak internal

maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pengguna pelaporan keuangan lainnya yang ingin menilai prospek *net cash flow* perusahaan, menjadi bagian yang penting untuk didiskusikan. Informasi laba haruslah menggambarkan keadaan ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya justru sering kali pihak manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba untuk memaksimalkan kepuasan mereka sendiri.

Tindakan manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba mengindikasikan adanya praktik manajemen laba (*earnings management*) pada perusahaan. Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait.

Manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulityanto, 2008). Sedangkan menurut (*National Association of Certified Fraud Examiners*, 1993 dalam Sulistyanto, 2008:49) mengartikan manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan mengenai fakta material dan data akuntansi, sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang pada akhirnya akan menyebabkan orang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya. Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yakni teori yang menyatakan bahwa

praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Sebenarnya perusahaan menghadapi suatu dorongan yang saling bertentangan pada saat melakukan manajemen laba. Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Namun demikian, di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (*Ettredge et al., 2008*). Langkah yang kemudian diambil agar keduanya dapat dicapai adalah dengan memanipulasi laba menjadi lebih tinggi untuk pelaporan keuangan tapi tidak untuk pelaporan pajaknya.

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Menurut Suandy (2011:16) pengertian perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Penelitian ini meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba karena perencanaan pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi

beban pajak. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Arles P. Ompusunggu (2011:5), Tax Planning yaitu suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Umumnya perencanaan pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.” Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau

dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan bepedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Perpajakan Akuntansi Komersial pada umumnya mengacu pada aturan-aturan standar yang ditetapkan dalam PSAK, namun demikian untuk menjalankan fungsi *budgeter* dan *reguler* pajak, pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) menetapkan beberapa aturan khusus yang berbeda dengan aturan akuntansi dalam PSAK.

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperoleh menurut peraturan perpajakan. Semakin besarnya motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan (Mills dan Newberry, 2001 dalam Irreza dan Yulianti, 2010).

Menurut Philips, Pimcus dan Rego (2003) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Sedangkan menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban

(penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan.

Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian. Penelitian *Philips et al.*, (2003) menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai hubungan yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai profitabilitas melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan terjadi bias apabila menggeneralisasi seluruh beban pajak tangguhan sebagai komponen diskresioner. Hal ini disebabkan beban pajak tangguhan dapat timbul karena perbedaan yang tidak dapat dihindari antara standar akuntansi dan pajak.

Fenomena perusahaan makanan dan minuman pertama terjadi beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84

miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara 15 beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. (10 Oktober 2017 | www.nasional.kontan.co.id).

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Drijen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Drijen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, *gross margin* TMMIN hanya sebesar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin*

TAM digabung TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (Senin, 08 Januari 2018 | www.nasional.kontan.co.id).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba adalah Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak. Perusahaan melakukan penghematan atau penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. Pihak Manajemen berkeinginan untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. Beban Pajak Tangguhan

Yulianti (2005), Birgita Deviana (2009), Sumomba dan Hutomo (2012), Yana Ulfah (2013).

2. Pajak Kini

Birgita Deviana (2009).

3. Perencanaan Pajak

Sumomba dan Hutomo (2012), Yana Ulfah (2013), Ferry dan Anna (2013).

4. Asimetri Informasi

Andreani dan Kiki Setiawati (2015).

5. Ukuran Perusahaan

Dewa dan Made, (2013), Fitriawati (2016)

6. Aset Pajak Tangguhan

Inasa Singkianti (2015)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sumomba dan Hutomo (2012) dengan judul “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2009”, lokasi penelitian ini pada perusahaan manufaktur dengan memperoleh data penelitian dari Gallery Efek Vast Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan *Indonesian Capital Market Directory* 2007 dan *Indonesian Capital Market Directory* 2008. Variabel yang diteliti adalah adalah praktik manajemen laba sebagai variabel dependen sedangkan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak sebagai variabel independen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dan terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur, sample penelitian sebanyak 95 perusahaan. Pengambilan sample dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 dan Tahun 2009, dan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2007 sampai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2009 yang dinyatakan dalam mata uang rupiah; Perusahaan manufaktur memiliki akun beban pajak tangguhan tahun 2008 dan tahun 2009; Perusahaan manufaktur tidak melakukan merger dan akuisisi selama periode pengamatan; Perusahaan manufaktur memiliki kelengkapan data publikasi yang berhubungan dengan pengukuran variabel beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan manajemen laba pada tahun 2008 dan tahun 2009.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen laba. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan dua periode penelitian yang diuji secara terpisah antara tahun 2008 dan 2009, akibat adanya perbedaan tarif pajak masing-masing periode. Pada penelitian ini terdapat 45 penelitian manufaktur yang memiliki data tidak lengkap, karena beberapa perusahaan belum mempublikasikan laporan keuangan tahun 2009.

Pengembangan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Sumomba dan Hutomo (2012) penelitian terdahulu mengambil data laporan keuangan selama 2 tahun dengan periode data 2008-2009, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode tahun yang lebih banyak yakni selama 5 tahun, dengan periode 2012-2016. Itu dimaksud agar peneliti mampu memberi hasil yang lebih akurat, serta semakin banyak tahun data semakin mendekati kejadian yang sebenarnya.

Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan seluruh manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti mengambil sektor ini dikarenakan sektor makanan dan minuman menjadi salah satu motor utama yang memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi sehingga laporan keuangan sektor ini menjadi bahan perhatian bagi calon investor atau investor (bkpm.go.id). Dan karena sektor *food and beverage* dianggap bisa lebih bertahan dalam krisis global karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Sejak krisis global yang terjadi pada pertengahan 2008, hanya industri makanan dan minuman yang dapat bertahan. Permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi (www.kompas.com).

Dalam penelitian ini penulis meneliti 2 (dua) variabel yaitu perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Alasan penulis memilih variabel-variabel tersebut adalah berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang konsisten dari setiap variabel tersebut.

Insentif manajemen melakukan manajemen laba menyebabkan semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan ini menimbulkan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan timbul dari proses koreksi fiskal, dimana terjadi korektif negatif, yaitu nilai penghasilan berdasarkan akuntansi lebih tinggi dari nilai penghasilan berdasarkan pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih kecil dari nilai penghasilan berdasarkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sesuatu indikasi manajemen

lebih memprioritaskan kenaikan laba akuntansi dibandingkan kenaikan laba fiskal dan penurunan biaya akuntansi dibandingkan biaya fiskal. Hal tersebut lumrah dilakukan oleh manajemen mengingat investor melihat kinerja perusahaan dari besar nilai laba akuntansi bukan dari besar laba fiskal (Sumomba dan Hutomo, 2012).

Di antara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, didalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan ini terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen ingin memungut pajak sebesar-besarnya. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak atau sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Ferry dan Anna, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya keinginan manajemen perusahaan untuk menekan dan menurunkan nilai beban pajak sekecil mungkin dalam pembayaran pajak, membuat manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan cara meminimalkan pajak dengan mengatur laba yang dilaporkan kepada fiskal
2. Beban pajak tanggihan dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba, karena beban pajak tanggihan dapat menurunkan tingkat laba perusahaan.
3. Manajemen laba dilakukan perusahaan karena satu sisi perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Dan sisi lain, manajemen perusahaan menginginkan untuk memaksimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2. Bagaimana beban pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
3. Bagaimana pelaksanaan manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
4. Seberapa besar perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
5. Seberapa besar beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

2. Untuk mengetahui beban pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
5. Untuk mengetahui besarnya beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktik nyata.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai teori-teori perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan dijadikan evaluasi terhadap perusahaan sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya mengenai topik perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai kelengkapan pengungkapan pada masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.6 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Adapun yang

dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.